

## kilas

## BPS: Dampak Inflasi Tarif Kereta Api Minim

JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi tidak akan menyumbang banyak pada laju inflasi. "Hitungan tarif kereta api ke inflasi itu 0,09 persen," kata Rusman di sela rapat kerja Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2011 di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.

Jumat pekan lalu, Kementerian Perhubungan mengumumkan menaikkan tarif kereta kelas ekonomi sebesar 15 persen. Namun keputusan kenaikan harga tiket sebesar Rp 500-8.500, yang baru berlaku satu hari itu, dicabut lagi oleh pemerintah pada Ahad.

Pemerintah beralasan, penundaan kenaikan tarif dilakukan karena menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini belum memungkinkan.

Rusman menjelaskan, kalau kenaikan itu sebesar 10 persen, pengaruhnya terhadap inflasi hanya 0,009 persen. Andaikan tarif kereta naik Rp 1.000-2.000 pun, ia menilai dampaknya ke inflasi masih bisa ditoleransi.

Tiket kereta ekonomi, kata Rusman, masih lebih murah dibanding biaya telepon. "Sekarang lihat saja orang naik kereta dari Bogor ke Jakarta, dia bisa SMS-an sampai 6-10 kali, itu sudah berapa dia keluarkan untuk SMS," katanya.

● IQBAL MUHTAROM

## Semen Gresik Bangun Pabrik Baru Tahun Depan

JAKARTA — PT Semen Gresik Tbk berencana membangun satu pabrik lagi tahun depan. Direktur Utama Semen Gresik Dwi Sutjipto mengatakan, pihaknya akan menyiapkan dana Rp 3,5-4 triliun untuk pembangunan pabrik baru itu.

"Sekitar 70 persen di antaranya berasal dari pihak eksternal, seperti kredit perbankan atau obligasi," kata Dwi di sela rapat kerja Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2011 di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin. Ada kemungkinan lokasi pabrik yang dipilih adalah Pulau Sumatera.

Perseroan ingin menambah kapasitas produksi sebanyak 3 juta ton hingga 2014. Perseroan juga mengandalkan tambahan kapasitas produksi sebesar 5 juta ton dari pabrik di wilayah Tuban dan Tonasa.

Tahun lalu, produksi Semen Gresik mencapai 18,5 juta ton dan diharapkan meningkat sekitar 9 persen tahun ini.

● EVANA DEWI

## Boediono: Pertumbuhan Indonesia Bisa Lebih Tinggi

Bisa lebih tinggi jika swasembada tercapai.

JAKARTA — Wakil Presiden Boediono menilai target pertumbuhan ekonomi 2011, yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,4 persen produk domestik bruto, terlalu rendah. Menurut Boediono, Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk mencapai laju pertumbuhan lebih tinggi.

"Pertumbuhan bisa lebih tinggi dari target 6,4 persen. Melihat potensi, 7-8 persen tidak masalah," ujar Boediono di hadapan para menteri, gubernur, dan bupati seluruh

Indonesia dalam Rapat Kerja Pelaksanaan Program Pembangunan di Jakarta Convention Center kemarin.

Kuncinya, kata Boediono, adalah dengan menggunakan energi yang ada sebaik mungkin, termasuk energi sosial serta meningkatkan kekuatan di bidang listrik, minyak, dan gas bumi.

Energi sosial berupa koordinasi antarpemangku kepentingan harus dimanfaatkan. Selama ini, kata dia, karena kesibukan membuat energi sosial sering terlupakan. Meski tak terlihat, energi sosial ini menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mendukung

Boediono. Menurut dia, koordinasi antara pusat dan daerah selalu menjadi hambatan memacu pertumbuhan. Karena itu, Agus berharap koordinasi dapat dimulai dengan rapat kerja yang dilakukan hari ini.

Persoalan infrastruktur menjadi permasalahan berikutnya. Menurut Agus, jika permasalahan infrastruktur bisa diselesaikan, pembangunan akan berjalan lebih cepat. "Jika infrastruktur bagus, pertumbuhan 6,4 persen menjadi terlalu rendah," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 6,4 persen adalah target yang mo-

derat. "Moderat dalam arti kemungkinan target itu bisa dicapai, bahkan 6,5 persen, mendekati 7 persen pun bisa," katanya.

Menurut Rusman, pertumbuhan hingga 7 persen akan tercapai bila pemerintah mampu menjaga produksi pangan dalam negeri dengan swasembada pangan. Komoditas beras, kata Rusman, selain masuk perhitungan inflasi, sudah *price leader*. Kenaikan harga beras akan berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya.

Kenaikan harga pangan dunia bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena memaksa pemerintah memilih menambah belanja impor pangan atau melakukan in-

vestasi. "Kalau investasi berkurang, tentu bisa mengancam pertumbuhan ekonomi," kata Rusman.

Kenaikan harga itu karena permintaan yang meningkat, menyusul terjadinya upaya pemulihan ekonomi global pascakrisis. Sayangnya, giatnya permintaan tak diimbangi pasokan yang memadai.

Pada sesi pertama rapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sasaran pertumbuhan 2011 sebesar 6,4 persen, inflasi 5,3 persen, tingkat pengangguran 7 persen, dan angka kemiskinan 11,5-12,5 persen. Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 1.229,6 triliun. ● ANTON WILLIAM | IQBAL MUHTAROM



DASRIL ROSZANDI (TEMPO)

## Kinerja JFX

Direktur Jakarta Futures Exchange M. Bihar Sakti Wibowo (kiri), Direktur Utama JFX Made Sukarwo, dan Direktur JFX Roy Sembel di kantornya, kemarin. Tahun lalu, JFX mencatat kenaikan total volume transaksi sebesar 21 persen, dari 4,48 juta lot pada 2009 menjadi 5,4 juta lot pada 2010.

## Bursa Calon Dirjen Pajak Mulai Muncul

JAKARTA — Rumor mengenai rencana Menteri Keuangan Agus Martowardojo bakal mengganti Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo semakin kencang. Sejumlah nama pun mulai disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Tjiptardjo.

Sumber *Tempo* di Lapangan Banteng (Kementerian Keuangan) mengungkapkan, sebanyak lima nama sedang digodok Agus memimpin Ditjen Pajak. Nama pertama yang muncul adalah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar (LTO) Amri Zaman.

Selain itu ada Sumihar Petrus Tambunan, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak, serta Riza Noor Karim, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak.

Pejabat dari daerah juga tak

kalah moncer. Setidaknya ada Dedy Rudaedy, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak I Jawa Barat, dan Ken Dwijugasteadi, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak I Jawa Timur.

Sebenarnya, Petrus dan Amri juga pernah disebut-sebut saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hendak mengganti Dirjen Pajak Darmin Nasution. Mereka bersaing dengan Robert Pakpahan dan Syarifuddin Alsyah. Sri Mulyani akhirnya memilih Tjiptardjo, yang justru muncul belakangan.

Tjiptardjo sendiri menyatakan siap diganti kapan saja. Namun hingga saat ini, ia mengaku belum mendengar ada rencana itu. "Saya enggak tahu. Itu kan kewenangan Pak Menteri dan Pak Presiden," katanya di sela Rapat Kerja Pelaksanaan Program

Pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center kemarin.

Menurut Tjiptardjo, pergantian pejabat adalah hal yang wajar, apalagi sebentar lagi dia akan memasuki masa pensiun pada Mei nanti.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Agus masih menolak memberikan penjelasan berkaitan dengan rencana pergantian pejabat di kementeriannya. "Belum ada cerita soal itu," ujarnya.

Seperti diberitakan, sejumlah pejabat eselon satu Kementerian Keuangan rencananya akan segera diganti. Sumber di Kementerian Keuangan menyebutkan, setidaknya ada delapan posisi yang bakal diisi pejabat baru. Pergantian berkaitan dengan rotasi, kekosongan jabatan, dan penggantian karena memasuki masa pensiun.

● IQBAL MUHTAROM | TOMY ARIYANTO | AGUSSUP

## Bank Siap Umumkan Bunga Referensi

JAKARTA — Meskipun masih ragu akan efektivitas publikasi suku bunga referensi (*prime lending rate*), kalangan perbankan menyatakan siap melaksanakannya. "Kami akan patuh dan taat," kata Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional Sigit Pramono ketika dihubungi *Tempo* kemarin.

Menurut Sigit, kebijakan baru Bank Indonesia tersebut tak akan serta-merta membuat semua bank menurunkan suku bunga kredit mereka. Yang bisa membuat suku bunga turun adalah suasana kompetisi antarbank. Misalnya di sektor korporasi dan kredit perumahan, yang bersaing menawarkan bunga murah.

Selain itu, kata Sigit, ada empat komponen utama yang mempengaruhi bank menetapkan bunga kredit. Yaitu faktor suku bunga dana, besar-kecilnya biaya-biaya tak langsung (*overhead cost*), tingkat margin keuntungan yang diharapkan, dan tingkat premi risiko. Setiap bank, kata Sigit, mempunyai penilaian sendiri atas risiko masing-masing nasabah. Semakin rendah risiko, bank bisa menawarkan bunga lebih kecil.

Seperti diketahui, Bank Indonesia akan mewajibkan bank mempublikasikan *prime lending rate*. Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliawan D. Hadad menyatakan, kebijakan tersebut diterapkan pada 31 Maret 2011. Dengan beleid ini diharapkan bank-bank bersaing terbuka, sehingga tingkat bunga kredit bank terdorong lebih rendah.

"Kami minta untuk mengumumkannya melalui *website* dan melalui laporan triwulan yang rutin disampaikan bank," kata Muliawan pekan lalu. Untuk sementara, kewajiban tersebut hanya diberlakukan untuk bank dengan aset di atas Rp 10 triliun. "Menurut data terakhir, jumlahnya kurang lebih ada 42 bank. Termasuk bank asing dan Bank Pembangunan Daerah," ujar Muliawan.

● FEBRIANA FIRDAUS